



AIDIL AKBAR, M.PD



BAB 1

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Tujuan pembelajaran

1. Ketepatan merinci perkembangan sejarah ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga era kemerdekaan dengan memperhatikan peristiwa dan kebijakan ekonomi penting.
2. Ketepatan mengidentifikasi dampak penting peristiwa sejarah terhadap ekonomi Indonesia, seperti Perang Dunia II atau krisis keuangan.
3. Ketepatan menjelaskan peran individu atau tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, atau tokoh ekonomi lainnya.
4. Ketepatan merinci perkembangan industri, sektor ekonomi, atau sektor perkebunan yang berpengaruh dalam sejarah perekonomian Indonesia.

B. Uraian materi

1. Sejarah Ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga era kemerdekaan

lokasi geografis Nusantara (wilayah Indonesia) yang berada di sekitar garis katulistiwa memberikan keuntungan dalam masa praindustri. Selain itu, sumber daya alam yang melimpah di wilayah tersebut juga merupakan faktor penting dalam perekonomian praindustri. Selama periode ini, Nusantara tidak terpisah dari jalur pelayaran niaga Asia, yang memungkinkan interaksi dengan berbagai kawasan lain di Asia, termasuk peradaban Hindu/Budha dan Cina. Interaksi ini memperkaya kehidupan penduduk Nusantara.

Dunia pelayaran Nusantara secara keseluruhan terjadi Ketika rempah-rempah seperti pala, cengkeh dicari di seluruh dunia, Nusantara menjadi bagian penting dari sistem ekonomi global. Oleh karena itu, sebelum berbicara tentang dunia pelayaran niaga Nusantara, kita harus mempertimbangkan masa lalu Indonesia yang sudah terlibat dalam perdagangan Asia, terutama di Samudra Hindia dan perairan Nusantara (Leirissa, Ohorella, Tangkilisan 1996). Oleh karena itu, penulis akan membahas sekilas tentang Nusantara di masa sebelum Emporium. Ini termasuk ekonomi Nusantara di masa sebelum pertanian tradisional dan perdagangan di masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

1. NUSANTARA PRA EMPORIUM

1.1. Ekonomi Prasejarah

Ekonomi Pra Sejarah Nusantara sangat erat kaitannya dengan masa prasejarah Indonesia atau Nusantara . Pra Sejarah Indonesia itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah umat manusia sendiri , bahkan sejarah alam semesta. Dari berbagai penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi. Indonesia telah didiami manusia purba yang meninggalkan jejak mereka pada awal masa Plestosen.

Diterangkan bahwa herhuru dan mengumpulkan makanan, merupakan corak penghidupan yang menjadi pokok dari tingkat perkembangan budaya pertama pada kala Plestosen itu. Kala Plestosen yang berlangsung kurang lebih tiga juta tahun. Dikutip dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta, 1996,

Dari beberapa penelitian yang dilakukan ahli ada laporan penelitian arkeologi dari CJH. Franssens bahwa di daerah Jawa Barat orang sudah menggunakan perhiasan gelang dari batu-batu pilihan seperti agat, kalsedon dan jaspis berwarna putih, kuning, coklat, merah dan hijau. Von Koningswald juga melaporkan menemukan gelang-gelang kulit kerang dan sejumlah manik-manik serta beliung persegi di daerah Krai dekat Surakarta . Selanjutnya MWF Tweddie mengatakan bahwa perhiasan-perhiasan tersebut dikejakan dengan cara menggurdi seperti gelang-gelang batu yang dikerjakan di Malaysia dan Thailand. Sedangkan di luar Indonesia gelang-gelang batu seperti itu, ditemukan juga oleh Szechwan, Fongtien, Siberia, Jepang, Korea, Jekol, Vietnam, Mungthai, Malaysia, Honan, Lamma dan Taiwan.

Menurut R.P. Suyono dalam "Sejarah Nasional Indonesia 1" (oleh Marwati Djoened P dan Nugroho Notos usanto), dengan dikenalkan konsep pertanian bercocok tanam, kita dapat memperoleh sedikit gambaran mengenai pola-pola tempat tinggal dan kegiatan perekonomian pada masa bercocok tanam tersebut. Ada kemungkinan desa-desa kecil seperti pedukuhan yang belum beraturan. Di sana terdapat kegiatan bercocok tanam dan sudah ada perdagangan yang bersifat barter. Demikian pula, hubungan antara kelompok masyarakat terbentuk.

Ada dua hal penting yang erat hubungannya dengan pertumbuhan masyarakat dan perkembangan peradaban. Pertama, ada masyarakat yang tinggal di tempat dan kedua, ada jangka waktu antara menanam dan mengikuti hasilnya. Selama periode antara penanaman dan panen, terjadi aktivitas yang menghasilkan keperluan rumah tangga, seperti kerajinan anyaman, pengasahan alat-alat kerja, pembangunan rumah secara "gotong-royong," pembuatan perahu, rakit, dan lain-lain. Hasil dari kegiatan ini sudah dipertukarkan dalam bentuk barter, termasuk menukar barang-barang dalam jarak yang jauh melalui sungai, laut, dan darat. Perahu dan rakit bambu menjadi sarana laut dalam perdagangan, sedangkan alat penyedot air digunakan untuk pertanian.

Barang-barang yang dipertukarkan dalam perdagangan ini diangkut melalui perahu dan rakit bambu yang menjadi sarana penting dalam jalur perdagangan, sementara alat penyedot air digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi dalam pertanian. Pola perdagangan seperti ini menggambarkan bagaimana komunitas pada masa bercocok tanam berinteraksi dan berdagang satu sama lain. Kegiatan ini tidak hanya menguntungkan dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam membangun hubungan sosial dan budaya antar kelompok masyarakat. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana pertumbuhan masyarakat dan perkembangan peradaban pada masa tersebut saling terkait dan mendukung satu sama lain, membentuk landasan bagi perkembangan lebih lanjut di masa yang akan datang.

1.2 Sistem Pertanian Tradisional

Profesor Kuntjaraningrat menjelaskan bahwa setelah kemampuan bercocok tanam menyebar ke lebih dari delapan lokasi di seluruh dunia, ekonomi pengumpulan makanan dalam bentuk pengumpulan beragam dan peracikan makanan mulai tergeser. Di Indonesia, ada beberapa tempat di mana praktik

pengumpulan makanan seperti ini masih berlangsung, seperti di pantai utara Irian Jaya, sebelah barat Jayapura, beberapa daerah di dekat Tanah Merah, beberapa tempat di pulau Seram, Maluku Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Hingga awal abad ke-20, penduduk masih bergantung pada pengumpulan sagu sebagai mata pencaharian utama mereka, selain dari menangkap ikan.

Contohnya, di Irian dan Maluku, pada akhir abad ke-19, penduduk sudah memiliki wilayah pengumpulan sagu yang diwarisi dari garis ayah mereka. Selain itu, seseorang juga bisa mengambil sagu dari wilayah saudara laki-laki ibunya. Dalam mencari dan mengolah sagu, seseorang dapat bekerja sama dengan ipar (saudara laki-laki dari istri) di wilayah mereka sendiri atau bisa bekerja sama dengan ipar di wilayah lain. Biasanya, hasil pengumpulan sagu dalam tim seperti ini dibagi secara merata, kecuali jika pengolahan dilakukan berdasarkan pesanan atau perjanjian, di mana pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Di bidang perikanan, dalam masyarakat desa nelayan di beberapa tempat di Maluku Tengah, misalnya, hampir semua nelayan memiliki perahu kecil. Perahu ini dikayuh oleh dua orang, yaitu pemiliknya dan pembantunya, yang biasanya adalah anaknya sendiri. Hampir setiap hari, keduanya berlayar bersama-sama menyeberangi daerah ombak pantai sejauh 2 atau 3 km ke laut, di mana mereka dapat melemparkan jala untuk menangkap ikan. Namun, jarak tersebut masih terbilang dekat untuk menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak. Nelayan miskin seperti mereka, yang hanya memiliki perahu kecil, hanya mampu menangkap ikan-ikan yang terdekat. Oleh karena itu, hasil usaha mereka tidak terlalu besar. Mereka juga sering berlayar untuk menangkap ikan pada malam hari, terutama saat terang bulan.

Kegiatan menangkap ikan pada malam hari, terutama saat terang bulan, merupakan upaya tambahan yang dilakukan oleh nelayan. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka. Meskipun demikian, mereka tetap menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah ikan yang dapat mereka tangkap karena keterbatasan peralatan dan perahu yang mereka miliki.

Tantangan ini mencerminkan situasi yang dihadapi oleh banyak nelayan di wilayah-wilayah pesisir di Indonesia, terutama yang beroperasi dengan sumber daya terbatas. Perahu kecil dan peralatan sederhana sering kali membatasi potensi tangkapan ikan mereka. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan seperti mereka sering kali menjadi fokus program-program pembangunan pesisir dan kelautan di Indonesia untuk memperbaiki peralatan, pelatihan, dan akses ke pasar yang lebih luas.

Selanjutnya, Pertanian mulai berkembang dengan memperhatikan bagaimana manusia mulai bercocok tanam. Menurut para ahli prasejarah, bercocok tanam telah dimulai pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Bara. Di Indonesia, zaman tersebut diperkirakan dimulai sekitar 2000 tahun sebelum masehi (Nugroho Notosusanto, 1982). Namun, aktivitas bercocok tanam di Indonesia baru diketahui pada awal abad ke-1 hingga ke-4 setelah masehi.

Pengertian tentang sistem bercocok tanam itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) bercocok tanam di ladang, dan 2) bercocok tanam menetap.

Bercocok tanam di ladang adalah suatu cara bercocok tanam yang terutama ditemukan di daerah hutan rimba tropis, serta daerah-daerah beriklim tropis dan subtropis. Para sarjana menggunakan berbagai istilah untuk merujuk kepada cara bercocok tanam ini, seperti "Shifting Cultivation" (Pertanian Tebas dan Bakar), dan baru-baru ini istilah "Swidden Agriculture" juga sering digunakan. Istilah-istilah tersebut mencerminkan unsur-unsur penting dalam teknik bercocok tanam ini. Cara bercocok tanam di ladang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Suatu daerah di hutan atau sabana disiapkan (ditebang dan dibakar),
- b) Lahan pertanian yang baru dibuka tersebut kemudian ditanami satu hingga tiga kali dalam satu periode (biasanya 1-2 tahun),
- c) Setelah itu, ladang tersebut dibiarkan tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama (biasanya 10-15 tahun), sehingga kembali menjadi hutan,
- d) Setelah periode tersebut berlalu, hutan bekas ladang tersebut dibuka kembali dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan pada langkah a, dan demikian seterusnya (P. Wayong, 1977).

Metode bercocok tanam di ladang ini mencerminkan cara tradisional yang digunakan oleh banyak masyarakat di daerah tropis dan subtropis untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitar mereka. Meskipun memiliki manfaat dalam memproduksi makanan, metode ini juga dapat berdampak negatif pada lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Terutama, pembukaan hutan dan pembakaran lahan dapat menyebabkan degradasi tanah dan kerusakan ekosistem.

Oleh karena itu, saat ini banyak upaya dilakukan untuk mengembangkan praktik pertanian berkelanjutan yang memadukan teknik bercocok tanam di ladang dengan pelestarian lingkungan. Hal ini termasuk rotasi tanaman, pengelolaan hutan yang lebih bijak, dan praktik-praktik lain yang dapat menjaga produktivitas tanah dan keseimbangan ekosistem sambil memenuhi kebutuhan pangan manusia.

Sistem pertanian yang berkelanjutan diatur dalam suatu organisasi masyarakat dapat juga dilihat seperti sistem subak di Bali. Dalam sistem pertanian ini, hasil pertanian tidak hanya diperhatikan dalam hal kualitasnya, tetapi juga kuantitasnya. Produksi hasil pertanian diarahkan menuju perdagangan. Pertanian sawah tidak hanya menghasilkan padi, tetapi juga tanaman palawija seperti jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang tanah, sayuran hijau, kedelai, dan lain sebagainya.

Hingga abad ke-15, padi telah menjadi tanaman yang sangat disukai karena dapat tumbuh dengan baik di hampir semua wilayah. Hanya di bagian timur Nusantara, seperti pulau-pulau Timor, Selayar, Buton, Kepulauan Maluku, dan Aru, penduduknya masih sangat bergantung pada sagu. Hal ini digambarkan oleh Reid dan Dampier bahwa penduduk yang lebih miskin harus mengandalkan sagu selama tiga hingga empat bulan dalam setahun. Sagu yang menghasilkan tepung

murni tersedia di sebagian besar daerah, siap bagi siapa pun yang memerlukannya.

1.3 Perdagangan di Masa Sriwijaya dan Majapahit

Zaman Sejarah Indonesia diketahui telah dimulai sejak munculnya kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Dari berbagai sumber berita Tiongkok, kita tahu tentang kerajaan-kerajaan lain dengan nama-nama seperti Sanfo-si, Che-li-fo-chi, Ta-chi, dan To-lo-mo yang telah menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok.

Van Leur menjelaskan bahwa pada periode tersebut, terdapat dua jalur perdagangan besar di Asia, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat dikenal sebagai "jalan sutera" yang dimulai dari Tiongkok, melalui Asia Tengah dari Turkestan hingga Asia Tengah, di mana jalur ini juga berhubungan dengan rute-rute karavan dari India. Hubungan perdagangan darat antara Tiongkok, India, dan Eropa telah terkenal sejak tahun 500 sebelum masehi. Jalur darat ini merupakan jalur perdagangan tertua.

Selanjutnya, Van Leur menjelaskan bahwa terdapat juga jalur perdagangan laut yang menghubungkan Tiongkok dan Indonesia melalui Selat Malaka ke India, dan dari sana ada yang menuju ke Teluk Persia, melalui Suriah ke Laut Tengah, serta ada yang mengarah ke Laut Merah, melewati Mesir dan mencapai Laut Tengah (JC. Van Leur, 1967).

Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia telah dimulai pada abad pertama sesudah masehi. Begitu juga hubungan perdagangan antara Indonesia dengan daerah-daerah di barat melalui India. Pada saat itu, rempah-rempah, kayu wangi, kapur barus, dan kemenyan dari Indonesia sudah sampai di India dan Kekaisaran Romawi.

Keuntungan yang diperoleh pada masa itu biasanya sangat tinggi karena biaya pengangkutan sangat mahal. Selain itu, proses pengiriman memakan waktu yang sangat lama, sehingga tidak mengherankan jika para pedagang mengejar keuntungan yang besar. Contohnya, pelayaran dari Tonkin ke India, seperti yang digambarkan oleh Burger, memakan waktu yang sangat lama, kadang-kadang bisa mencapai 12 hingga 15 bulan. Dari Kanton ke Palembang, memakan waktu sekitar 20 hari hingga satu bulan, sedangkan dari Aceh ke Tiongkok bisa memakan waktu enam bulan, dan dari Aceh ke Sri Lanka memerlukan waktu 20-30 hari (Burger dan Prayudi, 1962).

Perdagangan di Indonesia, terutama di kerajaan-kerajaan tradisional, seperti yang disebutkan oleh Van Leur, memiliki sifat kapitalis. Lebih jelasnya, ini dapat disebut sebagai kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dan kepala-kepala negeri sangat besar dalam perdagangan. Dalam perkembangannya, kapitalisme semacam itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kapitalisme modern dan kapitalisme perdagangan.

Kerajaan Sriwijaya adalah suatu kerajaan pesisir, negara perdagangan, dan negara yang berkuasa di wilayah maritim. Kekuatan dan kekayaannya berasal dari perdagangan internasional yang berlangsung melalui Selat Malaka, yang merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa. Jalur ini memiliki arti penting dalam sejarah selama lima belas abad. Sriwijaya adalah pusat perdagangan utama pertama dalam jalur ini, kemudian diikuti oleh kota-kota Jain.

Kapal-kapal yang melalui Selat Malaka singgah di pelabuhan-pelabuhan untuk mengisi air minum dan persediaan lainnya. Beberapa pelabuhan di pantai selat ini memiliki peran penting sebagai pelabuhan perbekalan, dan oleh karena itu Sriwijaya berusaha untuk memonopoli dan menguasai wilayah pesisir di kedua sisi Selat Malaka ini. Upayanya berhasil; daerah Jambi, Lampung, Semenanjung Malaka, dan wilayah Kra dikuasainya. Bahkan, Sriwijaya pernah menguasai pulau Sri Lanka setelah berperang dengan raja Cola di India pada abad ke-11. Pada tahun 767, Sriwijaya bahkan merampas Tonkin (Indochina, Hindia Belakang). Jangkauan pelayaran Sriwijaya mencakup lautan hingga India dan Hindia Belakang, bahkan mungkin sampai ke Madagaskar. Kapal-kapal yang melewati perairan Sriwijaya diwajibkan singgah di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, yang dikenal sebagai kerajaan yang menerapkan "paksaan manimbun barang."

Sriwijaya memiliki armada kapal sendiri. Kekayaan raja dan kaum bangsawan berasal dari usaha perdagangan mereka sendiri, dari bea masuk yang dipungut dari perdagangan yang melalui kerajaan, serta dari perburuan dan penjarahan laut. Selain itu, ada perdagangan keliling yang diorganisir oleh saudagar-saudagar Tiongkok. Selama beberapa abad, Sriwijaya berfungsi sebagai pusat perdagangan samudra, dan menjadi pusat kekuasaan yang mengendalikan pelayaran dan perdagangan di bagian barat Indonesia. Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatra Utara, Selat Sunda semuanya berada dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Meilink Roelofsz menjelaskan bahwa barang-barang yang diperdagangkan di sana termasuk tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, kain katun, sengkelat, perak, emas, sutera, pecah belah, gula, dan lainnya (Meilink Roelofsz, 1962). Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya sering dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Cina yang memperdagangkan barang-barang dari negara mereka atau negara yang mereka lintasi. Sementara itu, pedagang Jawa membeli barang-barang ini dan menjual rempah-rempah.

Selain Sriwijaya, kerajaan-kerajaan Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Timur, mulai muncul. Struktur kerajaan-kerajaan ini berbeda dengan Sriwijaya. Pusat-pusat kerajaan ini tidak terletak di pantai, melainkan di daerah pedalaman. Sejak lama, penduduk pulau Jawa jumlahnya lebih banyak daripada pulau Sumatra. Banyak sumber sejarah yang menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan Jawa Timur memiliki perdagangan laut yang luas. Namun, kekuasaan mereka tidak didasarkan pada perdagangan, melainkan pada pertanian, ekonomi desa,

kerja rodi, dan kewajiban para petani untuk memberikan sebagian dari hasil bumi mereka kepada para penguasa.

Kapitalisme politik yang ada dalam perdagangan di kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia memiliki ciri khas di mana pengaruh raja-raja dan kepala-kepala negeri sangat besar dalam mengendalikan perdagangan. Contohnya, raja-raja atau kepala kerajaan sering kali memiliki kendali atas sumber daya alam, seperti hasil pertanian atau komoditas perdagangan, dan mereka dapat mengatur pajak atau upeti atas perdagangan ini.

Sebagai contoh, di masa lalu, raja-raja di Jawa memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah, terutama lada hitam dan cengkeh. Mereka mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah ini, serta menerima bagian dari hasil perdagangan sebagai pajak atau upeti. Sistem serupa juga berlaku di kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.

Selain itu, raja-raja atau kepala-kepala negeri sering kali menjadi pemimpin dalam negosiasi perdagangan internasional. Mereka menjalin hubungan dengan pedagang asing, seperti pedagang Tiongkok atau Arab, untuk mengatur perdagangan lintas batas. Ini menciptakan struktur kapitalisme politik yang sangat berpengaruh dalam ekonomi tradisional Indonesia.

Selanjutnya, dalam bidang politik dan ekonomi, Samudra Pasai cukup kuat sehingga dapat mempertahankan kedaulatannya terhadap Malaka. Sebaliknya, kota-kota dagang di Jawa, khususnya dalam Kerajaan Majapahit, menjalin hubungan yang baik dengan Samudra Pasai. Bahkan, pernikahan antara pihak Majapahit dan Samudra Pasai dianggap mudah diterima karena tidak mengancam posisi ekonomi mereka (Sartono Kartodirjo, 1990). Pada masa itu, Kerajaan Majapahit telah menjadi sebuah kerajaan yang sangat berkembang, baik dalam struktur pemerintahan maupun birokrasinya. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dari sekitar tahun 1293 hingga sekitar tahun 1500, Majapahit muncul sebagai pengganti Sriwijaya, dan pengaruhnya mencakup wilayah Sumatra Utara hingga Kepulauan Maluku, di mana terdapat banyak kota dagang yang makmur. Perdagangan di wilayah tersebut tidak hanya mencakup perdagangan dan pelayaran pantai di Nusantara, tetapi juga perdagangan sepanjang jalur laut utama melalui Malaka menuju Samudra Hindia.

2. NUSANTARA DALAM PERIODE NIAGA

Secara konseptual, Samudra Hindia memiliki cakupan yang lebih luas daripada yang tertera dalam peta saat ini. Dalam pengertian ini, selain Samudra Hindia yang tercantum dalam peta, juga termasuk laut-laut Nusantara, Teluk Persia, dan Laut Merah yang sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Samudra Hindia.

Dengan demikian, seluruh wilayah pesisir Asia dan Timur Tengah yang terhubung dengan Samudra Hindia di atas, membentuk suatu sistem komunikasi yang terintegrasi. Melalui sistem ini, berbagai pelabuhan di Laut Merah, Teluk

Persia, Laut Arab, Samudra Hindia, Laut Jawa, dan berbagai laut dalam di Nusantara menjadi satu kesatuan interaksi yang, dalam berbagai tingkat, memengaruhi sejarah wilayah-wilayah tersebut, terutama dalam konteks ekonomi.

Unsur laut menjadi pengikat utama dalam wilayah maritim ini. Penelitian Prof. Chaudhuri dari Universitas London pada tahun 1989 secara jelas mengungkapkan sistem pelayaran niaga di Samudra Hindia. "Sejarah Kelautan" sebagai bidang studi ini pertama kali digagas oleh Fernand Braude pada studinya mengenai Laut Tengah pada tahun 1949. Kemudian, sejarawan Prancis ini memperluas cakupan studinya hingga mencakup seluruh dunia niaga Eropa, dengan Asia sebagai perbandingan utamanya. Studi Chaudhuri ini melengkapi dan mengoreksi berbagai aspek yang mungkin kurang tepat dari studi Braude mengenai pelayaran-niaga di Asia.

Kenyataan ini dapat menjelaskan berbagai aspek dalam sejarah Indonesia. Pertama-tama, kita dapat memahami mengapa sejak abad ke-14, kota-kota dagang dengan penduduk yang menganut agama Islam muncul di Nusantara. Kedua, kita juga bisa memahami mengapa pengaruh Islam yang muncul sejak saat itu banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hubungan antara berbagai kota dagang kecil di Nusantara dengan pusat perdagangan di India yang berbasis Islam juga memberikan warna tersendiri pada Islam di Indonesia selama periode niaga tersebut.

Namun, meskipun agama yang dominan adalah Islam, para penguasa kota-kota pelabuhan tersebut berusaha untuk tetap netral dalam urusan agama. Pedagang dengan latar belakang agama apa pun memiliki kebebasan untuk berdagang di kota-kota dagang ini. Keadaan politik dan stabilitas juga menjadi faktor penting yang selalu diperhatikan oleh para pengusaha. Kota-kota dagang yang terkenal dengan kekacauan atau ketidakstabilan politik tentu saja dihindari oleh pedagang.

Ini menjelaskan mengapa para pelarian dari Parsi yang menganut agama Zoroaster atau Jain (agama di Parsi sebelum Islam) dapat bertahan, bahkan menjadi dominan, di kota-kota dagang di pantai Barat India seperti Kambai dan Kalikut (kemudian Bombay, dll). Hal ini juga dapat menjelaskan mengapa berbagai kelompok dengan berbagai keyakinan agama dapat hidup berdampingan di Malaka, sebuah emporium yang menjadi penghubung antara Asia Barat dan Asia Timur.

2.1 Niaga Melalui Pelayaran di Nusantara

Dalam wilayah Nusantara, secara alami bermunculan berbagai emporia yang menjadi bagian dari jalur perniagaan antarbenua seperti yang telah disebutkan di atas. Bahkan, sejak abad pertama Masehi, Sriwijaya di Sumatra, bersama Funan (pelabuhan Oc Eo) di Kamboja dan Champa, merupakan emporia penting di kawasan Asia Tenggara.

Pada abad ke-15, Pasai, Malaka, dan Brunai menjadi emporia yang sangat signifikan. Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 bahkan

mengakibatkan munculnya berbagai emporia baru di Nusantara, seperti Aceh, Banten, Demak, Gresik, dan Makassar. Di Semenanjung, kota-kota seperti Patani, Johor, dan Pahang juga muncul sebagai pusat perdagangan, sementara di Filipina, Kota Manila juga menjadi pusat perniagaan yang penting.

Tabel 1 Perkiraan Kepadatan Penduduk Sekitar Tahun 1600 (Dalam Ribuan)

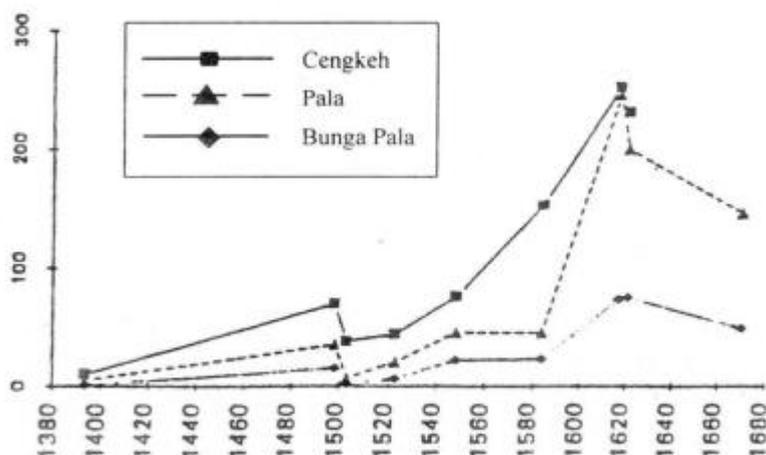
	Perkiraan 1800	Pertumbuhan abad 19	Perkiraan 1600	Pertumbuhan 1600-1800	Kepadatan 1600
Jawa	5.000	1.72	4.000	0.11	30.3
Sumatra	3.500	0.49	2.400	0.2	5.7
Kalimantan	1.000	0.83	670	0.2	0.9
Sulawesi	1.800	0.45	1200	0.1	6.3
Bali	700	0.25	600	0.08	79.7
Nusa Tenggara	900	0.54	600	0.2	9.1
Maluku	400	0.41	275	0.2	3.7
Jumlah	13.000		8745	0.5	5.0

Sumber: Diolah dari Reid 1988:14

Pada masa Malaka (1400-1511), pedagang dari wilayah tersebut dan juga dari Jawa mengangkut cengkeh ke kota-kota pelabuhan di Jawa, kemudian diambil oleh pedagang dari "atas angin" dan Cina di Malaka. Mereka kemudian mengedarkannya ke berbagai emporia di Asia dan Timur Tengah.

Tabel 1.2 Perkiraan Ekspor Rempah-rempah ke Eropa

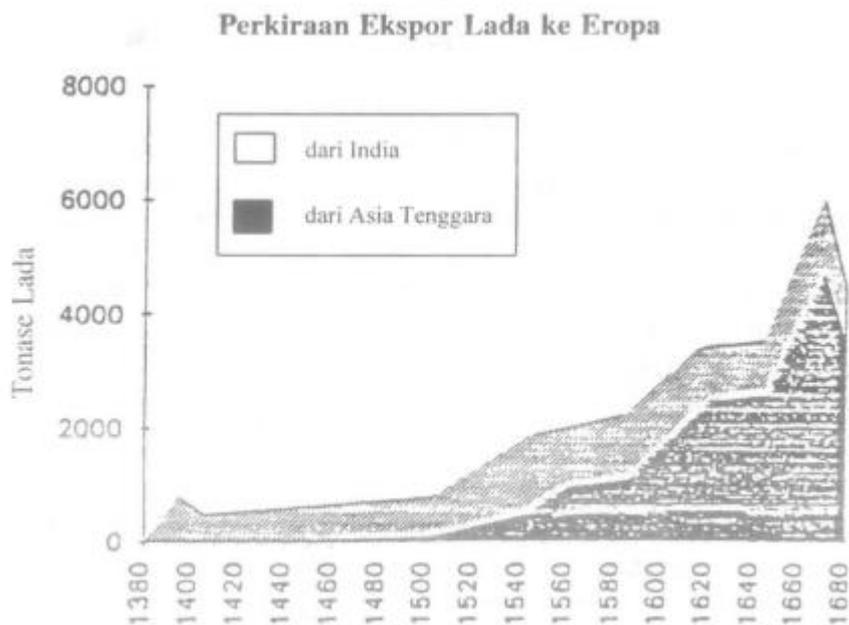
Perkiraan Ekspor Rempah-rempah ke Eropa



Sumber : Reid 1993: 14

Seperti yang terlihat dalam grafik tersebut, pertumbuhan perdagangan rempah-rempah dari Maluku dimulai sekitar akhir abad ke-14. Peran penting dimainkan oleh emporium Malaka yang muncul pada awal abad ke-15. Namun, perkembangan yang signifikan terjadi setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, yakni sekitar tahun 1520. Puncaknya terjadi sekitar tahun 1570 hingga 1620, setelah itu perdagangan rempah-rempah utamanya dikuasai oleh VOC.

Tabel 1.3 Perkiraan Ekspor Lada ke Eropa



Sumber : Reid 1993: 21

Tidak seperti di Maluku, di mana VOC memiliki kendali atas produksi rempah-rempah di beberapa pulau, dominasi VOC atas lada di wilayah ini tidak seutuhnya sama. Ekspor lada terbesar dari Nusantara berasal dari Aceh. Kerajaan yang menggantikan Pasai berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke pesisir Sumatra Barat dan Sumatra Timur, di mana lada banyak dihasilkan. Produksi lada diawasi oleh penguasa "panglima" Aceh yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis sepanjang garis pantai. Meskipun VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis pada tahun 1641, upaya mereka untuk menaklukkan Aceh selalu mengalami kegagalan.

3. CENGERAMAN KOLONIALISME

Dalam hal ekonomi, VOC tidak mengubah tatanan agraria di Nusantara kecuali di Maluku. Di wilayah tersebut, intervensi VOC menyebabkan pergeseran produksi cengkeh yang sebelumnya tersebar di beberapa pulau di Maluku Utara seperti Ternate, Tidore, Makian, dan Moti, beralih ke kepulauan Ambon, termasuk Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusalaut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan VOC antara Maluku Utara dan kepulauan Ambon. Di Maluku Utara, VOC memberlakukan larangan menanam dan menjual rempah-rempah (extirpasiestelsel), sementara di kepulauan Ambon, penduduk diwajibkan

menanam cengkeh untuk dijual kepada VOC (cultuur stelsel). Di kepulauan Banda, terjadi perubahan sedikit dengan pengelolaan kebun-kebun pala yang awalnya dimiliki oleh penduduk dialihkan kepada orang Eropa (perkeniers). Untuk menjaga kualitas produksi, VOC melakukan pengawasan ketat terhadap pemeliharaan, pemetikan, dan pengiriman cengkeh ke gudang-gudang VOC, baik di Ambon maupun di Banda.

Selain itu, di wilayah Priangan, VOC berhasil menjalin kerjasama dengan para bupati untuk mendorong penduduk menanam kopi yang akan dijual kepada VOC. Sistem ini, yang dikenal dengan sebutan "Preangerstelsel," terutama diterapkan pada abad ke-18 di beberapa kabupaten di Priangan. Meskipun kopi bukan tanaman asli Nusantara, melainkan berasal dari Semenanjung Arab, VOC mulai membeli kopi dari wilayah Timur Tengah sejak abad ke-17 karena ada pasar yang besar di Eropa.

Selama periode antara tahun 1830 hingga pertengahan abad ke-19, pihak Belanda menerapkan apa yang mereka sebut sebagai "cultuurstelsel" dalam upaya pembangunan ekonomi. Dalam sejarah tradisional Indonesia, istilah ini sering diganti dengan "Tanam Paksa," yang menekankan aspek normatif sistem tersebut, terutama mengenai penderitaan rakyat. Namun, istilah yang digunakan oleh Belanda dalam konteks ini lebih terbatas pada aspek ekonomi, sehingga padanan yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia adalah "sistem pembudidayaan." Tetapi, dalam pengelolaannya, terlihat bahwa aspek politik juga sangat menonjol.

Produksi pertanian dilakukan oleh petani di bawah pengawasan para bupati, dan hubungan politik yang telah terjalin antara Belanda dan Mataram sejak tahun 1755, khususnya setelah Perang Diponegoro di mana Belanda memberikan dukungan kepada pihak keraton, menciptakan kerangka politik yang memungkinkan pelaksanaan sistem ini.

4. MENUJU KEMAKMURAN

Sejarah ekonomi Indonesia setelah masa penjajahan Hindia Belanda mencerminkan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial yang memiliki sifat dualistik dan ketidakseimbangan spasial berusaha diubah menjadi ekonomi nasional yang lebih terpadu. Namun, konsep ekonomi nasional ini belum sepenuhnya diterapkan selama periode revolusi. Pada saat itu, situasi ekonomi masih dipengaruhi oleh ekonomi perang yang diperkenalkan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Pemerintah Militer Jepang menjalankan kebijakan pengalihan sumber daya ekonomi untuk mendukung kemajuan pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Dampaknya, terjadi perubahan besar dalam struktur ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi yang pernah ada sebelumnya terhenti dan kesejahteraan rakyat mengalami penurunan yang signifikan. Sektor industri perkebunan, yang menjadi tulang punggung ekspor pada masa penjajahan Belanda, mengalami kemunduran drastis. Sektor pertanian rakyat yang bergantung pada produksi padi, yang sebelumnya mencapai tingkat swasembada pada tahun 1940, juga

mengalami penurunan yang tajam. Bahkan terjadi krisis pangan. Perkembangan serupa terjadi di sektor produksi lainnya, termasuk industri manufaktur, sektor distribusi, dan jasa. Pembagian wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah pemerintahan yang berbeda merusak jaringan ekonomi yang telah ada sebelumnya.

4.1 Masa Pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan 1942—1950

Masa Kolonial Hindia Belanda berdampak besar pada perkembangan ekonomi masyarakat di masa selanjutnya. Struktur ekonomi kolonial menunjukkan adanya dualisme yang signifikan. Di satu sisi, terdapat sektor industri modern yang berfokus pada pasar, memiliki modal yang besar, dan menerapkan produksi massal. Di sisi lain, terdapat sektor ekonomi tradisional yang lebih bergantung pada tenaga kerja manusia dan memiliki skala yang lebih kecil. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan spasial dalam produksi. Persoalan ini kemudian dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya untuk mengintegrasikan perekonomian nasional.

Pada bulan November 1943, Jepang memperkenalkan program yang dikenal sebagai Kinkyu Shokuryo Taisaku (Tindakan-tindakan Mendesak Mengenai Bahan Makanan) di sektor pertanian. Program ini mencakup berbagai aspek seperti pengenalan varietas padi baru, inovasi teknik bercocok tanam, peningkatan infrastruktur pertanian, perluasan sawah, serta kampanye propaganda dan pelatihan bagi petani. Di sektor perkebunan, upaya untuk meningkatkan produksi bahan baku sandang, seperti kapas, rami, yute, rosela, dan sisal, juga diperkuat. Namun, perkebunan besar lainnya yang telah dikembangkan sejak zaman Hindia Belanda gagal mempertahankan tingkat produksi mereka (Kurasawa 1993).

Sayangnya, program pertanian Jepang tidak mencapai sasaran yang diharapkan, disebabkan oleh sejumlah faktor. Kondisi ekonomi perang tidak memungkinkan investasi pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan program ini, sementara kondisi ekonomi petani tidak mendukung kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan kehendak pemerintah. Hilangnya pasar dan pengalihan tenaga kerja untuk kepentingan perang juga menghambat pelaksanaan program ini. Selain itu, perubahan yang cepat dan pengenalan teknik baru menciptakan ketidakpastian dalam sikap dan penerimaan petani. Akibatnya, mereka tidak mampu meningkatkan produksi dan menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

4.2 Masa Demokrasi Parlementer 1950-1957

Pada tahun 1950-an, Indonesia sebagian besar belum memiliki kapasitas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang signifikan. Langkah-langkah yang diambil pada saat itu terutama terkait dengan rehabilitasi struktur ekonomi yang ada dan penanggulangan masalah keuangan. Pada saat itu, belum ada usaha atau pemikiran yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk. Meskipun pertumbuhan penduduk mulai dirasakan,

terutama seiring dengan migrasi penduduk ke daerah perkotaan yang lebih terkait dengan masalah keamanan.

Pada tahun 1951, diperkenalkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Rencana Urgensi Perekonomian. Pada dasarnya, program ini hanya berupa daftar proyek-proyek yang menyoroti kebutuhan mendesak dalam mengatasi masalah ekonomi yang mendesak. Dengan kata lain, program ini bukanlah perencanaan jangka panjang, melainkan lebih merupakan tindakan darurat untuk mengatasi penurunan ekonomi yang terjadi saat itu.

Salah satu kebijakan yang muncul selama periode Demokrasi Parlementer adalah dorongan untuk menciptakan lapisan pengusaha nasional. Pemerintah menyediakan sejumlah fasilitas untuk mendorong pengusaha nasional berkembang dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam membangun ekonomi nasional. Kebijakan ini dikenal sebagai Kebijakan Benteng yang menekankan Indonesianisasi. Kebijakan Benteng mempermudah pengusaha nasional pribumi dalam mengimpor barang dari luar negeri, dengan harapan bahwa mereka dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk berkembang menjadi pengusaha yang kuat secara finansial.

4.3 Masa Demokrasi Terpimpin 1958-1966

Pada akhir tahun 1956 dan awal tahun 1957, Presiden Sukarno memberikan serangkaian pidato yang menjadi latar belakang penghapusan sistem demokrasi parlementer yang telah berlaku sejak pembentukan kabinet Hatta pada Desember 1949. Penggantinya adalah bentuk pemerintahan yang kembali mengkonsolidasikan kekuasaan negara di bawah Presiden. Sistem politik yang berkembang sebagai hasilnya dikenal sebagai masa Demokrasi Terpimpin.

Masa Demokrasi Terpimpin adalah periode dalam sejarah politik Indonesia yang berlangsung dari sekitar tahun 1957 hingga 1965. Selama periode ini, Presiden Sukarno memegang kekuasaan yang sangat besar, dengan parlemen yang lebih sebagai badan konsultatif. Pemerintahan ini juga dikenal dengan istilah "Demokrasi Terpimpin" karena dipimpin oleh Sukarno tanpa sistem partai politik yang dominan. Pada tahun 1965, masa Demokrasi Terpimpin berakhir setelah peristiwa Gerakan 30 September, dan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menggantikannya.

Pada masa pemerintahan kabinet Juanda, yang merumuskan Rencana Juanda, Indonesia membangun fondasi ekonominya berdasarkan konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Biro Perancang Negara. Mereka mulai menggunakan instrumen yang dikenal sebagai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) untuk menghitung proyek-proyek yang memerlukan investasi dalam perencanaan pembangunan (Sjahrir, 1986). Konsep industrialisasi besar-besaran, yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, kembali dibahas. Dalam konteks ini, terdapat dua strategi utama yang diperdebatkan, yaitu Strategi Big Push Development dan Balanced Growth.

Strategi Big Push Development mengasumsikan bahwa, karena keterbatasan dana, pembangunan harus difokuskan pada sektor-sektor tertentu agar mereka

dapat tumbuh menjadi besar. Pada tahap tertentu, sektor yang telah berkembang akan menggerakkan pertumbuhan sektor lainnya. Sementara itu, strategi kedua cenderung mendistribusikan dana ke berbagai sektor pembangunan dengan penekanan pada keseimbangan. Dalam strategi ini, sektor industri dan sektor lainnya dikembangkan secara bersamaan hingga mencapai tingkat di mana masing-masing sektor dapat menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh sektor-sektor lainnya.

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Indonesia selama masa Demokrasi Terpimpin menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini memiliki dampak yang besar pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Di sektor moneter, terjadi depresiasi nilai mata uang, meninggalkan nilai yang hanya sepuluh persen dari nilai mata uang kertas yang berlaku pada masa itu (Paauw, 1967).

Pertumbuhan jumlah uang beredar meningkat seiring dengan tingginya tingkat inflasi. Dibandingkan dengan jumlah uang beredar pada tahun 1950, yang sekitar 4.300 juta rupiah, tingkat inflasi pada tahun 1960 meningkat dua kali lipat, dan pada tahun 1965 meningkat hingga lima belas kali lipat. Selain itu, anggaran pemerintah mengalami defisit, dan cadangan devisa negara juga mengalami penurunan yang drastis.

Penurunan ekonomi ini memberikan kontribusi besar terhadap ketidakstabilan sosial yang muncul di berbagai wilayah. Kondisi ini menjadi pemicu pergerakan politik yang akhirnya mengarah pada jatuhnya Presiden Sukarno. Indonesia memasuki era politik dan ekonomi yang baru, yang dikenal sebagai Orde Baru.

4.4 Masa Orde Baru : Repelita I—V

Perubahan dalam sistem politik dari Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila atau masa Orde Baru juga menghasilkan perubahan dalam orientasi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Program pembangunan nasional diarahkan melalui perencanaan bertahap yang terdiri dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun dan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama periode Orde Baru, pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional menjadi prioritas utama, yang memerlukan stabilitas politik sebagai prasyaratnya. Sebagian besar dana pembangunan, pada awalnya, diperoleh melalui bantuan luar negeri. Susunan kabinet berperan sebagai pengemban dan pelaksana program pembangunan, dan lebih bersifat kabinet zaken.

Repelita I menekankan kebijakan pangan, khususnya dalam bidang produksi dan konsumsi beras. Pada periode tersebut, kebijakan pangan sangat terkait dengan pasokan beras. Penyediaan beras yang memadai menjadi fokus utama pemerintah Orde Baru karena produksi beras menjadi kunci kesejahteraan rakyat. Produksi beras meningkat sekitar 47% menjelang berakhirnya Pelita I pada tahun 1974.

Pada Repelita II, pemerintah menetapkan target pertumbuhan sektor industri sebesar 31,0%, pertambangan sebesar 10,1%, dan pertanian sebesar 4,6%.

Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun sekitar 7,2%. Strategi industrialisasi yang diterapkan sejalan dengan strategi perdagangan internasional. Negara maju tidak lagi memproduksi barang-barang industri mereka sendiri, melainkan mencari lokasi produksi di negara-negara berkembang yang menyediakan fasilitas bersaing, pasar yang terbuka, ketersediaan bahan baku, dan tenaga kerja yang terjangkau.

Selanjutnya, Repelita III yang berlangsung dari tahun 1978 hingga 1983/1984 mengedepankan prinsip-prinsip utama berikut:

- a. Distribusi hasil pembangunan yang lebih merata untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (Booth, McCawley, 1990).

Pendapatan riil nasional direncanakan akan meningkat sebesar 6,5% per tahun dengan mengakselerasi pertumbuhan sektor industri dan penguatan. Pemecahan anggaran pembangunan secara sektoral menunjukkan penurunan sebesar 14% dalam sektor anggaran pertanian, sementara sektor industri, pertambangan, dan energi mengalami peningkatan sebesar 19%, dan sektor pengangkutan dan pariwisata meningkat sebesar 16,9%. Menjelang akhir Pelita III, sektor pertanian diperkirakan hanya mencapai sedikit lebih dari seperempat dari Gross Domestic Product (GOP). Selain itu, perhatian utama juga diberikan pada upaya meratakan distribusi hasil-hasil pembangunan di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih merata, termasuk pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan lainnya. Selain itu, menyadari bahwa penciptaan lapangan kerja baru yang produktif adalah penting untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam Pelita IV, program pengembangan ekspor komoditi industri terus diupayakan. Peran aktif dari sektor bisnis sangat penting dalam konteks ini, dengan peningkatan kemampuan eksportir sebagai fokus. Sesuai dengan prioritas pembangunan sektor industri, upaya untuk mengembangkan industri dasar yang telah dimulai sejak Pelita III diteruskan.

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Beberapa Sektor Utama Tahun 1991

Laju Pertumbuhan Beberapa Sektor Utama Tahun 1991	
Sektor	Pertumbuhan
Pertanian	1,3 %
Pertambangan	9,3 %
Industri pengolahan	9,8 %
Perdagangan	5,4 %
Pengangkutan dan Komunikasi	71,0 %
Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	12,7 %

Tabel 1.5 Ekspor Non-Migas & Migas Selama Pelita, 1989-1994

Ekspor non-Migas & Migas Selama Pelita, 1989--1994		
Tahun Anggaran	% Migas	% Non Migas
1989/1990	39,15	60,85
1990/1991	44,79	55,21
1991/1992	36,16	43,84
1992/1993	32,30	67,70
1993/1994	23,92	76,08

Periode	Sumbangan Migas	Sumbangan Non Migas
Pelita I	33,5%	66,5%
Pelita II	55,2%	44,8%
Pelita III	66,9%	31,1%
Pelita IV	50,5%	49,5%
Pelita 1V	36,0%	64,0%

Selama kurun waktu 25 tahun pertama Rencana Pembangunan, peran sektor minyak dan gas dalam kontribusi terhadap penerimaan devisa negara mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor non-migas.

Sementara itu, ketergantungan Indonesia pada sumber dana internasional untuk membiayai pembangunan bervariasi dari periode ke periode. Pada Pelita I, ketergantungan ini mencapai 77,1%, pada Pelita II 34,8%, Pelita III 30,0%, Pelita IV 56,7%, dan pada Pelita V sebesar 49,8%. Ketika ini dikaitkan dengan peningkatan nilai ekspor, menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk membayar pinjaman luar negeri semakin meningkat.

Secara keseluruhan, selama periode Pembangunan Jangka Panjang Pertama (25 tahun), laju pertumbuhan ekonomi dalam perbandingan dengan tingkat inflasi rata-rata adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Periode	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Inflasi
Pelita I	8,8 %	14,9 %
Pelita II	7,2 %	11,1%
Pelita III	6,1 %	13,2 %
Pelita IV	5,2 %	7,3 %
Pelita 1V	6,7 %	8,3 %

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,8% selama periode 25 tahun. Pengendalian laju inflasi menunjukkan komitmen

pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Sementara itu, pendapatan nasional per kapita meningkat dari US\$ 70 pada tahun 1969 (awal Pelita I) menjadi US\$ 605 pada tahun 1992. Laju pertumbuhan penduduk berhasil dikendalikan pada rata-rata 2,19% per tahun selama periode 1971-1990. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15% dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 1990, turun dari sekitar 60% dari total penduduk pada tahun 1970.

C. RANGKUMAN

Meskipun kita masih berada di tahap awal dalam memahami sejarah ekonomi Indonesia, kita dapat menyusun kesimpulan sementara yang dapat membantu kita memahami sejarah ekonomi Indonesia secara lebih baik. Kesimpulan ini menggabungkan informasi dari Bab II dan Bab III yang sebenarnya saling terkait.

Sejarah ekonomi Nusantara telah dimulai sejak abad ke-15, dan perkembangannya memiliki karakteristik unik. Melalui pelabuhan Malaka, berbagai emporium atau pusat perdagangan terbentuk di Nusantara, yang menjadi jalur pengiriman komoditas dagang seperti rempah-rempah dan distribusi berbagai bahan kebutuhan ke seluruh dunia. Menurut perhitungan sejarawan Prof. Anthony Reid, perkembangan ekonomi Indonesia mencapai puncaknya antara tahun 1570 hingga 1620, sebelum kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 1880.

Keruntuhan sistem perdagangan maritim Indonesia terutama disebabkan oleh campur tangan perusahaan-perusahaan perdagangan Barat. Perusahaan-perusahaan seperti East India Company (EIC) dan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memiliki karakteristik yang berbeda dengan pedagang Indonesia atau Asia lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah "armed trade" atau perdagangan bersenjata. Kapal dagang Barat dilengkapi dengan senjata berat dan pasukan militer mereka sendiri.

Mereka bahkan membangun benteng-benteng besar yang menjadi landasan kekuasaan mereka, yang tidak pernah ada di Indonesia. Wilayah perdagangan mereka dikuasai melalui sistem monopoli yang dikelola oleh benteng-benteng ini dan diawasi oleh angkatan bersenjata mereka. Seperti pengaruh besar perusahaan VOC di Indonesia pada masa kolonial, yang menguasai sebagian besar perdagangan di wilayah ini dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan benteng-benteng sebagai pusat pengendalian. Hal ini mengubah dinamika ekonomi dan perdagangan di Nusantara secara signifikan.

Selama abad ke-19, ekonomi Indonesia mengalami diversifikasi yang semakin erat kaitannya dengan pasar internasional. Meskipun pembangunan ekonomi telah terjadi sejak abad ke-19, dampaknya lebih menguntungkan pihak lain daripada Indonesia sendiri. Sistem ekonomi yang mendasari ini menjadi pintu gerbang bagi Indonesia menuju kemerdekaannya dan dimulainya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Perkembangan ekonomi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru mencatat peningkatan yang signifikan dalam mencapai target pembangunan. Sektor pertanian berkembang pesat, mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Selain itu, pembangunan di sektor industri juga membawa Indonesia ke dalam jajaran Negara Industri Baru yang diakui secara internasional.

Selama periode ini, Indonesia berhasil mencapai beberapa tonggak penting dalam pembangunan ekonominya, terutama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan negara ini. Hal ini membantu Indonesia untuk menjadi lebih mandiri dalam hal produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Selain itu, pembangunan di sektor industri juga membawa berbagai peluang dan peningkatan dalam ekonomi nasional. Indonesia menjadi pemain yang semakin dihargai dalam dunia internasional dalam hal industri dan produksi. Dalam konteks perkembangan ekonomi Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa tahap perkembangan ekonomi yang telah memengaruhi negara ini selama berabad-abad. Transformasi ekonomi ini terus berlanjut seiring waktu dan telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

D. TUGAS/LATIHAN SOAL

1. Jelaskan peran Nusantara dalam sistem perdagangan dunia pada periode niaga. Apa saja komoditas yang diperdagangkan dan bagaimana hal ini memengaruhi ekonomi Nusantara?
2. Analisis dampak kolonialisme terhadap ekonomi Indonesia. Faktor-faktor apa yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan bagaimana hal ini memengaruhi perkembangan ekonomi negara?
3. Bandingkan dan kontraskan dua dari empat periode sejarah perekonomian Indonesia (contoh, periode pra emporium dan periode kolonialisme atau periode kemakmuran dan periode niaga). Apa perbedaan dan persamaan utama dalam faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik antara kedua periode tersebut? Bagaimana perubahan ini memengaruhi sejarah ekonomi Indonesia secara keseluruhan?